



**ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM
INFORMASI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LABUHANBATU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh:

JEFRI ADE TARUNA HASIBUAN
2025100179

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2024**

Halaman Pengesahan

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

JUDUL : ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI AKUNTANSI SEKTOR
PUBLIK DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. LABUHANBATU

NAMA : JEFRI ADE TARUNA HASIBUAN
N.P.M : 2025100179
FAKULTAS : SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI : Akuntansi
TANGGAL KELULUSAN : 02 Mei 2024

DIKETAHUI

DEKAN



Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.

KETUA PROGRAM STUDI



Dr Oktarini Khamilah Siregar, SE., M.Si

**DISETUJUI
KOMISI PEMBIMBING**

PEMBIMBING I



Dra Mariyam, MSi., Ak.

PEMBIMBING II



Puja Rizqy Ramadhan, S.E., M.Si.

SURAT PERNYATAAN

NAMA : JEFRI ADE TARUNA HASIBUAN
NPM : 2025100179
PROGRAM STUDI : Akuntansi
FAKULTAS : SOSIAL SAINS
JUDUL : ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI AKUNTANSI
SEKTOR PUBLIK DI DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KAB. LABUHANBATU

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Unpab untuk menyimpan, mengahli-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan dan mempublikasikan karya Skripsi ini melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Penyataan ini saya perbuat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, Mei 2024



JEFRI ADE TARUNA HASIBUAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : JEFRI ADE TARUNA HASIBUAN
Tempat / Tanggal Lahir : Rantauprapat / 12-01-1997
NPM : 2025100179
Fakultas : Sosial Sains
Program Studi : Akuntansi
Alamat : J.L.A.YANI GG PUSRI

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Sehubungan dengan hal ini tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 16 Mei 2024

yataan

10000
SEPULUH RIBU RUPIAH
METERAI
TEMPEL
EF9FALX142388387
JEFRI ADE TARUNA HASIBUAN

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Anlisis Implementasi Sistem Informasi Akuntansi Sektor Publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu” . Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi sistem Informasi Akuntansi Sektor Publik yang telah dilakukan oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan Teknik Wawancara yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung kepada dua responden Kasubag Program Keuangan Bapak Rahmad Daulay dan staff Program Keuangan Bapak Syahrul Bahri Siregar dan Teknik observasi yaitu dengan melakukan pengamatan langsung terhadap implementasi sistem informasi akuntansi oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Kab. Labuhanbatu. Penelitian ini menggunakan model penelitian deskriptif kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif Proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Kata Kunci: Analisis Implementasi, Sistem Informasi Akuntansi Sektor Publik, Dinas Kominfo.

ABSTRACT

This research is entitled "Analysis of the Implementation of Public Sector Accounting Information Systems in the Communication and Informatics Service of Labuhanbatu Regency". The purpose of this research is to determine the implementation of the Public Sector Accounting Information system which has been carried out by the Labuhanbatu Regency Communication and Informatics Service. Data collection in this research was by interview technique, namely by conducting direct questions and answers to two respondents, Head of the Financial Program Subdivision, Mr. Rahmad Daulay and staff. Mr. Syahrul Bahri Siregar's Financial Program and observation technique, namely by making direct observations of the implementation of the accounting information system by the District Communication and Informatics Service. Labuhanbatu. This research uses a qualitative descriptive research model. The data analysis technique used is descriptive. The process of systematically searching and compiling data obtained from documentation by organizing the data into categories, describing it into units, carrying out synthesis, arranging it into patterns, choosing what is important and what will be studied, and make conclusions so that they are easily understood by yourself and others.

Keywords: Implementation Analysis, Public Sector Accounting Information System, Communication and Information Service.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Analisis Implementasi Sistem Informasi Akuntansi Sektor Publik Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kab. Labuhanbatu” Proposal skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih gelar sarjana Strata Satu (S-1) Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Selama penelitian dan penyusunan laporan penelitian skripsi ini, penulis tidak luput dari kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi.
2. Bapak Dr. E Rusiadi, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Ibu Dr. Oktarini Khamilah Siregar, SE., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Pembangunan Panca Budi.
4. Ibu Dra. Mariyam, Ak., M.Si., CA. selaku dosen pembimbing I (satu) yang sudah banyak membantu memberikan kritik dan saran terhadap perbaikan proposal skripsi penulis.
5. Bapak Puja Rizqy Ramadhan, SE., M.Si. selaku dosen pembimbing II (dua) yang juga sudah banyak membantu untuk perbaikan sistematika penulisan proposal skripsi penulis.

6. Para Dosen dan staff Kampus Universitas Pembangunan Panca budi Medan.
7. Ayahanda Supri Hidayat Hasibuan, Ibunda Adek Ani Siregar dan adik-adik Alwi Hanafi Hasibuan, Fauzi Ihsan Hasibuan, Dina Nabila Hasibuan yang selalu memberikan doa, nasihat, semangat serta dukungan dalam menyelesaikan skripsi penulis.
8. Istri tercinta Dara Juwita Damanik yang selalu memberikan doa, nasihat, semangat serta motivasi dukungan dalam menyelesaikan skripsi penulis.
9. Seluruh teman-teman khususnya di program studi Akuntansi yang telah memberikan dukungan dalam kebersamaan saat proses belajar selama ini.
10. Keluarga besar Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi penulis.

Medan, Mei 2024

JEFRI ADE TARUNA HASIBUAN
2025100179

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| ABSTRAK | i |
| ABSTRACT | ii |
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI | v |
| DAFTAR TABEL | viii |
| DAFTAR GAMBAR | ix |
| | |
| BAB I : PENDAHULUAN | 1 |
| 10.1 Latar Belakang | 1 |
| 10.2 Identifikasi Masalah | 4 |
| 10.3 Batasan Masalah..... | 5 |
| 10.4 Rumusan Masalah | 5 |
| 10.5 Tujuan Penelitian | 5 |
| 10.6 Manfaat penelitian..... | 5 |
| 10.7 Keaslian Penelitian | 6 |
| BAB II : TINJAUAN PUSTAKA | 8 |
| 2.1 Uraian Teoritis | 8 |
| 2.1.1 Teori Keagenan | 8 |
| 2.1.2 Hubungan Keagenan | 10 |
| 2.1.3 Pengertian Analisis | 11 |
| 2.1.4 Pengertian Implementasi | 14 |
| 2.1.5 Pengertian Sistem..... | 16 |
| 2.1.6 Pengertian Informasi | 19 |
| 2.1.7 Pengertian Akuntansi | 20 |
| 2.1.8 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi..... | 24 |
| 2.1.9 Pengertian Akuntansi Sektor Publik | 27 |
| 2.1.10 Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik | 30 |
| 2.1.11 Karakteristik Akuntansi Sektor Publik | 31 |
| 2.1.12 Tujuan Akuntansi Sektor Publik..... | 32 |
| 2.1.13 Tahapan Sistem Informasi Akuntansi Sektor Publik | 33 |
| 2.2 Penelitian Sebelumnya..... | 34 |
| 2.3 Kerangka Pemikiran..... | 38 |
| BAB III : METODE PENELITIAN | 39 |
| 3.1 Pendekatan Penelitian..... | 39 |
| 3.2 Tempat dan Waktu Penelitian | 39 |
| 3.2.1 Tempat Penelitian..... | 39 |
| 3.2.2 Waktu Penelitian | 39 |
| 3.3 Defenisi Operasional | 40 |
| 3.4 Jenis dan Sumber Data | 40 |
| 3.4.1 Jenis Data | 40 |
| 3.4.2 Sumber Data..... | 41 |
| 3.5 Metode Mengumpulkan Bahan | 41 |
| 3.6 Teknik Analisis Data | 41 |
| BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 44 |
| 4.1 Hasil Penelitian..... | 44 |

| | | |
|------------------------------------|--|-----------|
| 4.1.1 | Gambaran Umum Dinas Kominfo Kabupaten Labuhanbatu | 44 |
| 4.1.2 | Struktur Organisasi | 50 |
| 4.1.3 | Gambaran Sistem Informasi Akuntansi Pada Kominfo Labuhanbatu | 51 |
| 4.2 | Pemahaman pegawai dan masalah pada sistem informasi akuntansi | 48 |
| 4.2.1 | Ketepatan waktu dalam menghasilkan laporan keuangan | 54 |
| 4.2.2 | Laporan keuangan menghasilkan informasi yang jujur dan wajar | 54 |
| 4.2.3 | Laporan keuangan menghasilkan informasi yang dapat diverifikasi dan netral | 54 |
| 4.2.4 | Laporan keuangan menghasilkan informasi yang dapat dibandingkan dan dipahami | 55 |
| 4.3 | Pembahasan | 56 |
| BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN | | 61 |
| 5.1 | Kesimpulan | 61 |
| 5.2 | Saran | 61 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 62 |
| LAMPIRAN | | 64 |
| BIODATA | | 70 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 2.1 Perbedaan Akuntansi Sektor Publik dengan Sektor Swasta..... | 29 |
| Tabel 2.2 Mapping Penelitian Sebelumnya..... | 34 |
| Tabel 3.2 Skedul Proses Penelitian..... | 40 |
| Tabel 3.3 Definisi Operasional..... | 40 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--------------------------------------|----|
| Gambar 2.3 Kerangka Berpikir..... | 38 |
| Gambar 4.1 Struktur Organisasi | 51 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah memfasilitasi proses kemandirian daerah, yang merupakan komponen penting dari program desentralisasi dan otonomi daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah harus dibuat untuk memenuhi Pasal 293 dan Pasal 330 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Salah satu peraturan operasional yang mendukung otonomi daerah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini dibuat setelah era reformasi tata kelola keuangan negara atau daerah, yang ditunjukkan dengan undang-undang bidang keuangan negara yang disahkan. Peraturan ini mendorong daerah untuk mengubah dan memperbaiki cara mereka mengelola dan mengelola keuangan mereka.

Selanjutnya Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Setelah reformasi manajemen keuangan negara dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, termasuk Undang-Undang bidang keuangan negara seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15

Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yang menghasilkan peraturan ini.

Menurut undang-undang, kepala daerah harus menyerahkan kepada DPRD rencana daerah untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan laporan keuangan yang diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan tidak lebih dari enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan harus menunjukkan bagaimana data keuangan diubah menjadi informasi keuangan melalui sistem informasi keuangan, yang terdiri dari berbagai jenis dokumen, alat komunikasi, dan tenaga pelaksana. Ini memenuhi permintaan pengguna laporan keuangan untuk meningkatkan perbandingan laporan keuangan dengan anggaran, periode, dan entitas.

Menurut penelitian Nasution (2021), dalam penelitiannya tentang Analisis Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Dilakukan Di Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan, memperlihatkan Sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) mencakup sistem keuangan dan perencanaan pembangunan daerah, serta sistem pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Makitulung (2019) dengan judul penelitiannya Analisis Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan hasil penelitiannya yang menunjukkan bahwa pada Akuntansi aset Kabupaten Kepulauan Sangihe jelas dan sesuai dengan sistem akuntansi pemerintah.

Penelitian yang dilakukan oleh Damayanti (2020) pada Studi Kasus:Sistem Akuntansi Pemerintah: Analisis Sistem Pengendalian Internal memberikan bukti

bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang telah menerapkan sistem pengendalian internal yang sesuai dengan unsur-unsur dalam sistem pengendalian internal yang dibuat oleh pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 dan Undang-undang No. 1 tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara untuk meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Penelitian yang dilakukan oleh Masruri (2020) dengan judul Sebuah studi tentang pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sumedang menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Andivo dan Silvera pada tahun 2020, Analisis Sistem Akuntansi Keuangan Daerah di BKD Kabupaten Pesisir Selatan, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Pesisir Selatan telah menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah, yang telah memenuhi peraturan menteri dalam negeri No.21 tahun 2011 dengan menerapkan laporan pertanggungjawaban yang transparan, cepat, akurat, dan relevan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah pada pasal 4 ayat (1) Setiap pemerintahan daerah, termasuk lembaga pelaksana, harus menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) berfungsi untuk menyediakan informasi tentang Pemerintahan Daerah, yang terdiri: a. Informasi Pembangunan Daerah b. Informasi Keuangan Daerah. Menurut Ayat (2), Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) mengelola informasi yang disebutkan pada Ayat (1).

Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Labuhanbatu sebagai salah satu organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah, mereka harus menerapkan Sistem Informasi Akuntansi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Mereka juga bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan sebagai bagian dari penanggung jawab pengguna anggaran/barang dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan yang dimaksud adalah hasil dari penggunaan sistem informasi akuntansi publik untuk memastikan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik diterapkan, Namun, pegawai sering bertanya tentang langkah-langkah proses data dan fungsi menu sistem informasi, yang menunjukkan bahwa mereka kurang terampil dalam menggunakan sistem informasi akuntansi serta diketahui ternyata dari 35 orang pegawai Dinas Kominfo Kabupaten Labuhanbatu masih ada 9 orang pegawai yang tidak dapat menggunakan teknologi secara optimal. Akibat masih kurangnya kemampuan pegawai dalam menggunakan sistem informasi ini menyebabkan laporan keuangan yang seharusnya dapat disajikan lebih cepat justru memerlukan waktu yang tidak efisien dan cenderung terlambat.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan Sistem Informasi Akuntansi dengan judul: Analisis Implementasi Sistem Informasi Akuntansi Sektor Publik Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kab. Labuhanbatu.

1.2 Identifikasi Masalah

Peneliti menentukan masalah penelitian bahwa para pegawai cenderung terlihat kurang terampil dalam penerapan sistem informasi akuntansi karena dari 35 orang pegawai masih ada 9 orang pegawai yang tidak dapat menggunakan teknologi secara optimal dengan demikian waktu penyajian laporan keuangan tidak efisien dengan cenderung waktu yang terlambat.

1.3 Batasan Masalah

Penulis membatasi penelitian ini pada analisis Sistem Informasi Akuntansi Sektor Publik agar peneliti tidak menyimpang dari masalah yang diinginkan.

1.4 Rumusan Masalah

Penelitian ini berfokus pada implementasi sistem informasi akuntansi sektor publik oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu.

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Labuhanbatu telah menerapkan sistem Informasi Akuntansi Sektor Publik.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penelitian ini dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Merupakan tempat untuk belajar, menulis, dan berpikir kritis secara ilmiah dengan menerapkan literatur dan konsep yang sudah ada. Spesifik untuk analisis sistem Informasi Akuntansi Sektor Publik.

2. Bagi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kab. Labuhanbatu

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu referensi saat mempertimbangkan penerapan sistem informasi akuntansi sektor publik.

3. Bagi Universitas Panca Budi Medan

Untuk membantu akademisi memahami pentingnya analisis sistem informasi akuntansi sektor publik dan sebagai referensi bagi peneliti berikutnya yang ingin meneliti masalah yang sama pada masa yang akan datang.

1.7 Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan Andivo & Silvera (2020) dengan judul “Analisis Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Pesisir Selatan”.

Pada penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu yang terletak pada:

- 1. Model Penelitian**

Dalam penelitian terdahulu menggunakan menggunakan metode analisa kualitatif dan menggunakan uji tanda yang dikemukakan oleh Dixon, W.J dan Massey, Jr. F.J sedangkan penelitian ini menggunakan model penelitian deskriptif kualitatif.

2. Variabel Penelitian

Dalam penelitian terdahulu menggunakan variabel mandiri yakni Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan penelitian ini variabel mandiri sistem Informasi Akuntansi Sektor Publik.

3. Tahun Penelitian

Studi sebelumnya dilakukan pada tahun 2020, sedangkan studi ini dimulai pada tahun 2022.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian terdahulu dilakukan pada Kabupaten Pesisir Selatan sedangkan penelitian ini dilakukan pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kab. Labuhanbatu.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Uraian Teoritis

2.1.1 Teori Keagenan

Menurut (*Liu and Sickles, 2021*), teori ini memberikan penjelasan tentang mengapa pengusaha tidak dapat mengelola bisnis mereka sendiri. Teori ini menekankan pentingnya memisahkan kepemilikan atau kepemilikan saham dari manajemen demi kepentingan para agen yang lebih memahami bagaimana bisnis sehari-hari dilakukan. Manajemen harus melakukan koordinasi dan mengoptimalkan kelompok tersebut. Harga barang yang dibeli rendah, harga barang yang dijual tinggi, suku bunga pinjaman rendah, harga saham tinggi dan gaji rendah untuk karyawan. Dalam hubungan tersebut, manajemen bertindak sebagai agen dan berupaya memperoleh masukan dari prinsipal (bankir, pemegang saham, karyawan).

Menurut (*Hussain and Akbar, 2022*), badan tersebut bertugas mengelola perusahaan dan menyusun laporan keuangan sebagai sarana untuk mengambil tanggung jawab atas kontrak yang telah disepakati di awal kontrak. Lebih lanjut, laporan keuangan dapat menjelaskan situasi pada suatu perusahaan. Namun, keakuratan laporan keuangan tersebut harus dibuktikan.

Alasan peneliti menggunakan teori keagenan adalah karena ada agen yang memanfaatkan kemampuannya, bahkan kekayaan dan harta bendanya, demi keberhasilan dan kelangsungan hidup (kelanjutan) perusahaan.

Pada organisasi sektor publik, akuntabilitas didefinisikan sebagai tugas wali (agen) untuk melaporkan, menyampaikan, melaporkan dan menyampaikan setiap kegiatan dan tindakan yang bertanggung jawab kepada prinsipal, yang memiliki hak dan wewenang untuk menuntut akuntabilitas, menurut Mardiasmo dalam Dwi (2021:18), dalam konteks sektor publik, akuntabilitas menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah terdapat hubungan antara masyarakat sebagai aktor dan pemerintah sebagai agen. Konsep yang didasarkan pada teori keagenan berkaitan dengan bagaimana organisasi sektor publik melaporkan keuangan mereka. Sebagai perantara dalam pelaporan keuangan, pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi mereka yang menggunakannya untuk menilai tanggung jawab dan membuat keputusan ekonomi, sosial, dan politik, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Agency theory telah diterapkan pada organisasi modern. Menurut teori keagenan, sangat penting bagi pemegang saham atau pemilik bisnis untuk menyerahkan manajemen bisnis mereka kepada penyedia jasa profesional yang disebut agen. Tujuan pemisahan manajemen dan kepemilikan adalah agar pemilik perusahaan dapat menjalankan perusahaan melalui karyawan khusus dan mencapai keuntungan sebesar-besarnya dengan biaya yang paling efisien. Tugas pegawai yang profesional adalah mewakili kepentingan pemilik perusahaan dan mempunyai kebebasan untuk mengambil tanggung jawab pengelolaan perusahaan. Seorang ahli bertindak sebagai perwakilan pemegang saham, dalam hal ini keuntungan broker akan terkait dengan ukuran perusahaan. Namun tugas pemilik usaha dan mitra hanyalah memantau dan mengawasi pengelolaan

perusahaan yang dikelolanya, serta mengembangkan sistem insentif agar pengelola bertindak demi kepentingan perusahaan. Namun di sisi lain, kebebasan manajemen untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan juga mempunyai kelemahan yaitu dapat memaksimalkan keuntungan sekaligus mengambil tanggung jawab dan biaya yang harus ditanggung oleh manajer bisnis. Lebih lanjut, pemisahan ini dapat mengakibatkan kurangnya transparansi penggunaan dana perusahaan dan tidak seimbangnya kepentingan yang ada. Misalnya, hubungan antara manajemen dan pemegang saham, bersama dengan perbedaan antara pemegang saham mayoritas dan minoritas (Tandiontong, 2015).

Menurut Silaban dan Suryani (2020), Dalam teori keagenan, prinsipal adalah hubungan antara pemegang saham dan manajemen. Konflik kepentingan terjadi karena ada perbedaan kepentingan antara pihak internal dan pihak eksternal. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan masalah ini, auditor eksternal harus mengevaluasi dan memberikan pendapat tentang laporan keuangan manajemen yang dibuat dan disusun sesuai dengan peraturan akuntansi yang berlaku., guna memastikan bahwa laporan keuangan aman dan andal, memeriksa kembali apakah bebas dari penipuan dan disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

2.1.2 Hubungan Keagenan

Menurut Ghozali dan Chariri, ada tiga kemungkinan hubungan keagenan jika ada dua pihak atau lebih:

1. Antara manajemen dan pemegang saham: Ketika manajemen memiliki lebih sedikit saham dibandingkan perusahaan lain, mereka cenderung melaporkan laba yang lebih tinggi atau lebih konservatif.

2. Antara manajer dan kreditor, kreditor umumnya berasumsi bahwa perusahaan yang sangat menguntungkan akan membayar utang dan bunganya tepat waktu, sehingga manajer cenderung melaporkan laba yang lebih tinggi.

3. Pemilik usaha cenderung melaporkan keuntungan secara konservatif daripada pemerintah, analis sekuritas, dan pemangku kepentingan lainnya. Perusahaan besar biasanya menghadapi sejumlah konsekuensi.

2.1.3 Pengertian Analisis

"Analisis" berasal dari kata Yunani kuno *analisis*, yang berarti "melepaskan". Kata ini terdiri dari dua kata, "ana" yang berarti "memberi kembali" dan "luein" yang berarti "melepaskan", yang jika digabungkan berarti "melepaskan lagi" atau "menjelaskan". Kata "analisis" diadopsi ke dalam bahasa Inggris dan menjadi "*analysis*", dan kemudian diadopsi juga ke dalam bahasa Indonesia dan menjadi "analisis" (Trisnawati, 2018). Menurut Djam'an Satori dan Aan Komariah (2014: 200), analisis adalah proses memecah (*decomposition*) suatu masalah atau fokus penelitian menjadi bagian-bagian sehingga terlihat struktur/tatanan formal tergantung apa yang dijelaskan. Sebuah upaya untuk transparan sehingga anda dapat melihatnya lebih jelas atau memahami suatu permasalahan dengan lebih jelas (Hapsara, 2022). Menurut *Efrey Liker* (Puspitasari, 2020), tujuan analisis adalah mengumpulkan informasi untuk menentukan sumber suatu masalah, yang merupakan akarnya. Analisis adalah kegiatan mempelajari suatu objek tertentu secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai. Istilah analisis biasanya digunakan ketika melakukan penelitian atau mengulas suatu esai, kajian, pernyataan, atau peristiwa yang terjadi. Analisis merupakan upaya mengamati sesuatu secara rinci dengan

menggunakan metode tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, analisis adalah studi suatu peristiwa dapat esai, alur atau sebagainya guna mengetahui keadaan sebenarnya (Abdi, 2021). Pengertian analisis menurut para ahli adalah:

1. Komarudin

Proses berpikir yang disebut analisis memecah suatu keseluruhan menjadi bagian yang lebih kecil, yang memungkinkan kita memahami sifat masing-masing bagian, bagaimana mereka berhubungan satu sama lain, dan peran masing-masing bagian dalam keseluruhan yang lebih besar.

2. Wiradi

Analisis adalah proses mengelompokkan, menganalisis, dan membedakan objek berdasarkan standar tertentu. Proses ini juga mencakup mengeksplorasi hubungan dan makna antara komponen-komponen tersebut.

3. Dwi Prastowo Darminto

Analisis adalah memecah sesuatu menjadi bagian-bagian kecil dan mempelajari bagaimana masing-masing bagian berinteraksi satu sama lain. Dengan melakukan ini, kita dapat memahami dan memahami sesuatu secara keseluruhan.

4. Robert J. Schreiter

Analisis adalah tindakan “membaca” suatu teks, menemukan karakter yang berbeda dan menempatkan karakter tersebut serta pesan yang disampaikan ke dalam interaksi yang dinamis.

5. Husein Umar

Analisis merupakan suatu proses kerja yang terdiri dari serangkaian langkah kerja pra-investigasi dan didokumentasikan dengan langkah-langkah pembuatan laporan.

Sugiyono (2019) mendefinisikan analisis sebagai proses pengumpulan dan pengambilan data secara sistematis dari berbagai sumber, termasuk catatan lapangan dan wawancara. Mudah untuk memahami dan mengkomunikasikan hasilnya kepada orang lain. Menurut pandangan ini, analisis adalah suatu aktivitas yang diawali dengan eksplorasi, mengkategorikan sesuatu untuk digolongkan menurut kriteria tertentu, menguraikannya, membedakannya, dan menggabungkan masing-masing bagian menyatu menjadi satu. Analisis data untuk menarik kesimpulan dari data tersebut agar data yang diperoleh mudah dipahami oleh diri sendiri atau orang lain.

Sementara itu, Suryana (2015 hal.244) menyatakan bahwa analisis merupakan Kegiatan ini mencakup mengumpulkan, mengabstraksi, dan mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional dengan tujuan menemukan solusi untuk masalah. Artinya melakukan analisis meliputi mengelaborasi, memisahkan, membedakan, menghubungkan, mengorganisasikan, dan mengintegrasikan materi, konsep, atau permasalahan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang dapat dipahami dan diselesaikan. Oleh karena itu, menganalisis kegiatan memberikan kesimpulan yang mudah dipahami dan komprehensif tentang masalah. Selain itu, menganalisis aktivitas bukanlah tugas yang mudah. Melakukan analisis memerlukan keterampilan karena hasil kegiatan analitis memberikan kesimpulan yang dapat diandalkan yang dapat digunakan oleh diri sendiri dan orang lain. Sebagaimana dikemukakan Nasution, melakukan analisis itu sulit dan membutuhkan banyak usaha. Analisis membutuhkan kreativitas dan keterampilan intelektual tingkat lanjut. Tidak ada metode khusus yang dapat digunakan untuk

melakukan analisis. Oleh karena itu, setiap peneliti harus menemukan metodenya sendiri yang dirasa sesuai dengan jenis penelitian yang dilakukannya (dalam Sugiyono, 2019:319).

Berdasarkan pengertian di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa analisis adalah suatu bentuk mempelajari peristiwa melalui deskripsi, pembedaan, dan klasifikasi untuk mengungkap keadaan sebenarnya.

2.1.4 Pengertian Implementasi

Para ahli dan ilmuwan berbeda pandangan tentang implementasi. Hal ini perlu dilakukan sebagai tanggungjawab agar konsep penelitian dan sistem kebijakan yang dibahas dalam penelitian ini dapat dipahami secara bersamaan. Beberapa hal berikut menunjukkan betapa pentingnya implementasi dalam proses perencanaan kebijakan.

Lister (Taufik dan Isril, 2013:136) mengatakan “Akibatnya, implementasi bergantung pada seberapa memuaskan arahan yang diprogramkan.”

Sesungguhnya, kebijakan biasanya dibuat dengan tujuan yang jelas, antara lain jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, yang akan dilaksanakan setelah dirumuskan, dan merupakan "salah satu tahapan dalam proses kebijakan publik suatu negara", menurut Syauckani (Pratama, 2015: 229).

Sedangkan menurut Wahyu (Mulyadi, 2015:50), Kajian implementasi adalah penelitian tentang proses implementasi. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan umpan balik tentang implementasi kebijakan, memeriksa apakah proses sesuai dengan rencana dan standar, dan menemukan masalah atau hambatan yang muncul selama proses.

Menurut Purwanto (Syahida, 2014:13), Keberhasilan proses implementasi

dipengaruhi oleh beberapa komponen. Ini termasuk kualitas kebijakan itu sendiri; kecukupan input kebijakan (terutama anggaran); ketepatan instrumen yang digunakan untuk mencapai tujuan kebijakan (misalnya, subsidi, hibah, pelayanan, dan sebagainya); kapasitas implementor (misalnya, struktur organisasi, dukungan SDM, koordinasi, pengawasan, dan sebagainya); dan karakteristik dan dukungan dari kelompok sasaran.

Menurut *Webster Dictionary* (Syahida, 2014:8) Dalam hal definisi implementasi, dikatakan bahwa "Implementasi adalah terjemahan dari kata "*implementation*", yang berasal dari kata latin "*implementatum*", yang berarti "mengisi penuh, melengkapi," dan "*plere*" berarti "mengisi penuh." Pertama, implementasi dimaksudkan untuk " menghasilkan suatu hasil, menyempurnakan, dan menyelesaikan"; kedua, "Menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu, memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesuatu" adalah definisi implementasi"; dan ketiga, tujuan implementasi adalah untuk menyediakan atau menyempurnakan alat.

Menurut *Mazmanian dan Sebatier* (Waluyo, 2007:49), menyebutkan bahwa implementasi adalah ketika keputusan-keputusan kebijakan yang mendasar dilaksanakan, biasanya dalam bentuk undang-undang, tetapi juga dalam bentuk peraturan-peraturan penting dan keputusan-keputusan peradilan lainnya, keputusan-keputusan tersebut mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan dan terstruktur atau terorganisir seperti itu proses implementasi.

Menurut Mulyadi (2015:12), implementasi adalah istilah yang merujuk atas tindakan yang diambil demi menggapai target nan ditentukan pada kesimpulan.

Tujuan dari perbuatan ini adalah untuk menafsirkan kesimpulan tertera pada motif-motif aktivitas dengan membawa transfigurasi, baik luas maupun sempit, nan sudah ditetapkan lebih dahulu. Dalam implementasi, kita perlu memafhumi apapun nan berjalan sesudah satu rancangan dijalankan.

Pada tatanan realistik, implementasi merupakan metode melakukan ketetapan penting. Metode ini terjadi di sebagian tingkatan, antara lain:

1. Tingkatan legalisasi undang-undang;
2. Cara instansi pelaksana melaksanakan keputusan;
3. Kemampuan kelompok sasaran untuk mengambil keputusan;
4. Efek nyata dari keputusan, baik yang diinginkan maupun yang tidak; dan
5. Upaya untuk memperbaiki kebijakan atau peraturan perundangan.

Penyediaan layanan, pembayaran, dan hal lainnya secara teratur; persiapan sumber daya, unit, dan metode; dan penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan petunjuk yang dapat diterima. Ini adalah beberapa hal penting dalam proses persiapan implementasi.

Menurut pendapat para ahli tersebut, penafsiran implementasi merupakan mekanisme nan merujuk dengan keputusan beserta aplikasi nan dilakukan badan ataupun institusi, terutama yang berhubungan beserta kantor negara, serta mencakup alat fasilitas nan menyutujui aplikasi tersebut diimplementasikan.

2.1.5 Pengertian Sistem

Sistem berasal dari kata latin *systēma* atau bahasa Yunani *sustēma* yang berarti suatu kesatuan komponen atau unsur yang saling berhubungan untuk memperlancar aliran informasi, materi, dan energi. Sistem juga merupakan kumpulan bagian-bagian yang mempunyai hubungan berbeda satu sama lain

dalam suatu wilayah, serta mempunyai unsur-unsur yang berperan sebagai penggerak. Di bawah ini adalah pengertian sistem ini dari beberapa pendapat para ahli terkait:

Dalam bentuknya yang paling mendasar, sistem adalah kumpulan objek, unit, atau bagian dengan fungsi berbeda yang bekerja sama, saling menguntungkan, dan mempunyai rencana atau strategi bersama untuk mencapai tujuan tertentu dalam lingkungan. (Ridho 2018)

Dari segi terminologi, suatu sistem digunakan dalam berbagai cara, sehingga sulit untuk mendefinisikan atau menggambarkannya sebagai seperangkat aturan yang harus dipatuhi oleh semua pengguna untuk menentukan apa yang paling penting. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pengetahuan tentang sistem didasarkan pada cara orang memilih untuk mendefinisikannya. Menurut undang-undang, sistem diartikan sebagai kumpulan unsur-unsur yang saling berhubungan, baik dari segi kapasitas sistem maupun lingkungan di mana sistem itu berada untuk menjamin stabilitas dan keamanan. (Ridho 2018).

Kurnia Cahya Lestari dan Arni Muarifah Amri (2020:7) ini menunjukkan bahwa suatu sistem terdiri dari dua atau lebih komponen yang terhubung dan berinteraksi untuk membentuk kelompok yang bersatu dan mencapai suatu tujuan.

Zaki Baridwan (2015:4) pengertian sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang disebut subsistem yang berkaitan dengan tujuan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Mulyadi (2016:4) dijelaskannya, sistem merupakan suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut suatu pola yang terpadu untuk menjalankan kegiatan utama perusahaan.

Menurut (Arifin, 2020), Sistem dalam *Webster New Collegiate Dictionary* menyatakan bahwa kata “syn” dan “*Histanai*” berasal dari bahasa Yunani, sehingga mengandung arti sinonim. Oleh karena itu, menurut Arifin Rahman, Pengertian Sistem adalah sekumpulan beberapa pendapat (kumpulan pendapat), prinsip, dan lain-lain yang telah membentuk satu kesatuan yang saling berhubungan antar satu sama lain.

Menurut (Romney, 2015), sistem adalah kumpulan dua atau lebih komponen yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan yang mana sistem tersebut biasanya dibagi menjadi subsistem-subsistem yang lebih kecil yang mendukung sistem yang lebih besar.

Menurut Sutarman (2016), sistem adalah kumpulan elemen-elemen yang berinteraksi guna melaksanakan suatu proses tertentu. Menurut Prehanto (2020:3) sistem merupakan kumpulan komponen fisik dan non fisik yang saling berhubungan dan bekerja secara harmonis untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Hutahaen (2015:2) Sistem merupakan suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berkaitan, berkumpul dan melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu.

James A. O'Brien dan George M. Marakas (2014:27) Sistem merupakan sebagai kumpulan komponen yang saling berkaitan, dengan sebuah batasan yang jelas, bekerja secara bersama untuk mencapai sebuah tujuan yang sama, dengan menerima masukan dan menghasilkan keluaran dalam sebuah proses transformasi yang terorganisir.

Menurut Jerry Futz (dalam Rusdiana dan Moch. Irfan 2014: 29) menjelaskan bahwa sistem ialah seperangkat jejaring aktivitas melalui aturan-

aturan nan saling berkaitan, berkumpul serentak melaksanakan aktivitas maupun menyelesaikan maksud terpilih.

Jadi dari kira-kira anggapan nan dikemukakan diatas dapat disimpulkan maka sistem ialah sekelompok bagian dan elemen nan digabungkan menjadi satu guna memperoleh tujuan tertentu. Sistem sebenarnya terdiri dari dua bagian, yaitu struktur dan proses. Struktur adalah komponen penyusun dari sistem tersebut dan proses merupakan prosedur dari sistem tersebut.

2.1.6 Pengertian Informasi

Menurut Prehanto (2020: 12), “Informasi merupakan hasil pengolahandata dengan cara tertentu sehingga lebih berarti dan berguna bagi penerimanya”.

Menurut *Ruthven* dan *Kelly* (dalam Sugiyanto 2022: 1), “Informasi didefinisikan sebagai “data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau saat mendatang”.

Menurut Hutahean (dalam Harianto 2019: 5), “Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya. Sumber informasi adalah data. Data kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian - kejadian dan kesatuan nyata”.

Menurut Sutabri dalam (Yanuardi & Permana, 2018) informasi adalah data yang telah diklasifikasikan atau diolah atau diinterpretasikan untuk digunakan dalam prosedur pemungutan kesimpulan.

Menurut H. A. Rusdiana dan Moch. Irfan (2014: 75) informasi ialah sepotong informasi atau item yang telah diproses dengan tepat untuk memungkinkan pengorganisasian dan klasifikasi yang tepat, memberikan konteks

kepada penerima dan memungkinkan mereka memperoleh pengetahuan tentang topik tertentu yang membantu dalam membuat keputusan yang tepat.

Menurut James A. O'Brien dan George M. Marakas (2014: 36) informasi merupakan sebagai data yang telah diolah menjadi sesuatu hal yang bermakna dan bermanfaat bagi penggunanya.

Menurut Hasan & Muhammad (2020) informasi adalah data yang diolah menjadi sebuah bentuk yang berguna bagi pengguna yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau mendukung sumber informasi. Informasi adalah hasil pengolahan data yang memberikan arti dan manfaat atau kumpulan data yang telah diolah menjadi sesuatu yang memiliki arti dan manfaat yang lebih banyak dan lebih luas. Dapat disimpulkan bahwa informasi adalah sekumpulan data yang bersumber dari fakta-fakta dan diolah sedemikian rupa sehingga menjadi lebih bermanfaat bagi yang menggunakannya. Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang memiliki arti bagi yang membutuhkan dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau yang akan mendatang.

Dari pernyataan para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa informasi adalah data yang diolah menjadi sesuatu lebih berguna bagi penerima informasi yang selanjutnya dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan saat ini atau mendatang. Informasi meningkatkan pengetahuan bagi penerima, sehingga penerima dapat suatu kondisi secara objektif.

2.1.7 Pengertian Akuntansi

Akuntansi melibatkan pencatatan sistematis, klasifikasi, peringkasan, pengelolaan, dan penyajian data keuangan, transaksi, dan peristiwa. Hal ini bertujuan untuk memberikan informasi yang mudah dipahami oleh individu untuk

pengambilan keputusan dan berbagai keperluan lainnya. Rudianto (2012:4) Akuntansi berfungsi sebagai sistem informasi yang menghasilkan informasi keuangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, memberikan mereka wawasan tentang aktivitas ekonomi perusahaan. Selanjutnya bersumber dari Warren (2014:3), Akuntansi berfungsi sebagai sistem informasi yang menyampaikan laporan komprehensif kepada pemangku kepentingan, menawarkan wawasan mengenai aktivitas ekonomi dan keadaan perusahaan secara keseluruhan.

Defenisi akuntansi dari IAI adalah pengindentifikasian, pencatatan, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian-penilaian dan keputusan yang jelas serta tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut.

Menurut AICPA (*American Institute of Certified Public Accountants*) Akuntansi merupakan langkah-langkah untuk mengenali, mengukur, mencatat, dan menyampaikan data keuangan yang penting untuk pengambilan keputusan.

Menurut Profesor *Kieso, Weygandt, dan Warfield* (Penulis Buku Akuntansi) Dalam bukunya, "*Intermediate Accounting*" mereka menerangkan bahwa akuntansi merupakan sesuatu sistem data yang mengukur, menganalisis, serta memberi tahu data keuangan.

Menurut Profesor *Meigs* (Penulis Buku Akuntansi) Dalam buku "*Accounting: The Basis for Business Decisions*" mereka melaporkan bahwa akuntansi merupakan sesuatu proses mengenali, mengukur, serta menyajikan data ekonomi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Menurut *American Accounting Association* (AAA), akuntansi merupakan proses pencatatan, pengklasifikasian, serta penyajian data ekonomi yang

membolehkan pengambilan keputusan yang bijaksana.

Menurut *Financial Accounting Standards Board* (FASB) mendefinisikan akuntansi selaku sistem yang mencatat, menganalisis, serta memberi tahu data keuangan sesuatu entitas.

Menurut Profesor *Albrecht* dan *Stice* (Penulis Buku Akuntansi) Dalam buku “*Accounting Concepts and Applications*” mereka menerangkan bahwa akuntansi merupakan bahasa bisnis yang mencatat transaksi keuangan.

Menurut Profesor *Horngren, Sundem, Elliott, dan Philbrick* (Penulis Buku Akuntansi) Dalam buku “*Introduction to Financial Accounting*” mereka mendefinisikan akuntansi selaku proses pengukuran serta pelaporan data keuangan.

Menurut Profesor *Nobes dan Parker* (Penulis Buku Akuntansi Internasional) Dalam buku mereka tentang akuntansi internasional, mereka menegaskan kalau akuntansi merupakan proses pengukuran, pelaporan, serta interpretasi kegiatan keuangan.

Menurut Profesor *Anthony dan Reece* (Penulis Buku Akuntansi), Akuntansi merupakan suatu proses pengenalan, pengukuran, dan penyampaian data ekonomi guna mendukung pengambilan keputusan yang rasional.

Menurut Sugiri dan Riyono (2018:1), akuntansi diartikan sebagai suatu kegiatan pelayanan yang tujuannya untuk memberikan informasi kuantitatif, khususnya tentang uang. Informasi ini diharapkan berguna dalam proses penentuan tren ekonomi dan ras. Berikut adalah beberapa contoh ekonomi:

1. Menerima atau menolak kredit (bank atau lembaga keuangan lain yang sedang memproses kredit dari nasabah atau titik dua).

2. Mengembalikan atau menambah jumlah uang (surat tanda pemikiran pada persero terbatas) yang kini tersedia.
3. Menimbulkan kepercayaan atau kewajiban untuk menghimpun dana dari masyarakat umum. Akuntansi terdiri dari tiga komponen utama, yang tercantum di bawah ini:
 - a. Input (masukan): transaksi, yaitu peristiwa bisnis bersifat keuangan.
 - b. Proses (prosedur): mencakup berbagai fungsi mulai dari identifikasi transaksi hingga pengelolaan informasi keuangan. Proses akuntansi yang utama adalah pencatatan, yang terdiri dari dua fungsi: akumulasi dan pembukuan.
 - c. Output (keluaran): berupa keuangan informasi seperti laporan laba rugi, laporan ekuitas, perubahan posisi keuangan, dan laporan arus kas.

Menurut Thomas Sumarsan (2020:1), auditing adalah proses pengumpulan, identifikasi, pengkategorian, dan pendokumentasian transaksi dan pencatatan keuangan guna memperoleh informasi yang dapat digunakan oleh pihak-pihak terkait. Metode pencatatan, penggolongan, analisa dan pengendalian transaksi, serta keuangan kegiatan, yang melaporkan hasilnya. Berikut adalah beberapa contoh kesenjangan pengetahuan:

1. Identifikasi dan pengumpulan fakta yang relevan untuk tujuan pengambilan keputusan.
2. Pengumpulan dan analisis data, dilanjutkan dengan penyebaran informasi.
3. Komunikasi informasi kepada pengguna laporan.

Winwin Yadianti, Ilham Wahyudin (2020:6-7). Akuntansi adalah sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan kejadian

ekonomi dari suatu organisasi kepada pihak yang berpentingan. Berikut adalah beberapa kegiatan yang termasuk dalam pembelajaran:

- 1) Mengidentifikasi Pembangunan ekonomi terkait dengan kegiatan ekonomi yang relevan dari suatu organisasi tertentu. Pembayaran barang dan jasa, serta pembelian kredit, merupakan contoh kegiatan ekonomi.
- 2) Mencatat Menurut sejarah kegiatan keuangan organisasi. Pencatatan dilakukan secara sistematis, berurutan dengan kronologi kejadian, dan harus diukur dalam satuan moneter. Selama proses ini, data ekonomi diklasifikasikan dan diorganisasikan.
- 3) Mengkomunikasikan informasi ekonomi kepada pemangku kepentingan utama dalam bentuk laporan keuangan yang dapat digunakan sebagai landasan pengambilan keputusan.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah suatu sistem proses pencatatan yang memberikan informasi keuangan tentang kegiatan dan status suatu perusahaan kepada pemangku kepentingan lainnya.

2.1.8 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi akuntansi mengumpulkan, menyimpan, dan mengolah data transaksi keuangan dan non keuangan untuk membantu pengambilan keputusan.

Menurut Natalia (2020:172) "Sebuah sistem yang membereskan informasi nan negosiasi sehingga memantapkan keterangan nan mempunyai arti untuk dapat melakukan perancangan, penanganan, dan pendayagunaan kegiatan" adalah sistem informasi akuntansi.

Menurut *Romney & Steinbart* dalam Natalia (2020:172) mendefinisikan Sistem informasi akuntansi diartikan seperti "sistem nan dapat mengakumulasi,

membuku, mengarsip, dan mengerjakan bahan dan menjadikan keterangan guna pada penggugah ketentuan".

Pendapat lain dikemukakan oleh Indrasti & Sulistyawati (2021:67) yang menyebutkan sistem informasi akuntansi adalah "sistem yang mengumpulkan, memproses, dan melaporkan informasi tentang transaksi keuangan".

Menurut Dariana & Desriyanti (2017:213) Sistem adalah kumpulan komponen nan begitu berkaitan nan bekerja sama demi menggapai satu target. Struktur biasanya mencakup sebagian komponen yang koheren dan independen dari sistem yang lebih besar nan berfungsi untuk menunjang sistem nan berkembang; struktur keterangan finansial mencakup lima bagian, sebagai berikut:

1. Petugas

Individu nan menjalankan struktur dengan melakukan beberapa tugasnya.

2. Ketentuan

Prosedur mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data tentang operasi organisasi.

3. Data

Data, seperti laporan keuangan atau transaksi kas, adalah fakta-fakta yang digunakan untuk membuat keputusan.

4. *Software*

"*Software*" mengacu pada data digital nan membentuk dan mencadangkan, yang terdiri dari aplikasi *workstation*, petunjuk, dengan beberapa informasi nan dapat melafalkan sekaligus mencatat dengan *workstation*.

5. *Hardware*

Hardware merupakan seluruh poin wujud *workstation* nan mengaplikasikan demi

menggarap bahan, ini termasuk *workstation*, perangkat pembantu, dengan perangkat koneksi jejaring.

Pendapat lain menurut Angraini & Hendarsyah (2019:) yang mengemukakan: Sistem adalah kumpulan dua atau lebih komponen yang berkolaborasi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Skema dapat termasuk beberapa bagian, juga dikenal sebagai sub-sistem; contohnya, Subsistem komputer terdiri dari subsistem perangkat keras dan perangkat lunak. Subsistem perangkat keras terdiri dari subsistem subsistem atau komponen pendukung sistem, seperti perangkat keras, yang terdiri dari alat masukan, alat keluaran, alat pemrosesan, dan media penyimpanan, untuk mencapai tujuan sistem, setiap sub-sistem harus bekerja sama satu sama lain. Data adalah data yang telah diproses atau dianalisis sehingga bermanfaat bagi pengguna. Manfaat dari informasi adalah mereka dapat digunakan oleh pengguna untuk membuat keputusan. Sistem informasi akuntansi adalah sistem yang memproses data dan transaksi untuk menghasilkan hasil yang diinginkan, serta mengukur kinerja bidang usaha, mengerjakan bahan membentuk informasi, serta menyampaikan buaatannya pada beberapa pemungut kesimpulan.

Menurut Santosa (2020:77) sistem informasi akuntansi merupakan “kumpulan sumber daya dan peralatan (manusia) yang dirancang untuk mengubah data keuangan menjadi bentuk yang bermanfaat dan bermanfaat bagi penggunanya”.

Mardi (2014) dalam Widjajanto (2001) menyatakan bahwa Sistem Informasi Akuntansi adalah kumpulan alat komunikasi, laporan, dokumen, dan staf pelaksana yang digunakan untuk mengubah data keuangan menjadi informasi

keuangan.

Romney (2005) menyatakan bahwa bagian sumber daya manusia dan modal perusahaan adalah sistem informasi akuntansi. Ini bertanggung jawab untuk memberikan informasi keuangan dan informasi yang diterima, serta mencatat dan memproses berbagai transaksi bisnis.

Aktivitas yang dilakukan oleh Sistem Informasi Akuntansi (SIA) terdiri dari perangkat lunak, prosedur, dan aktor (orang). Aktor (orang) berfungsi sebagai operator sistem atau mengontrol dan menjalankan berbagai prosedur dilakukan dengan tangan manusia dan dikerjakan oleh mesin, seperti penumpukan, pengerjaan, dan pengarsipan bahan tentang operasi keuangan institusi. Program ini digunakan untuk mengolah data institusi.

Berdasarkan pengertian di atas, Sistem informasi akuntansi dapat mengumpulkan, mengorganisir, menyimpan, dan mengolah informasi tentang transaksi akuntansi dan memberikan hasil informasi akuntansi dan keuangan. Oleh karena itu, hasil ini dapat membantu pengambilan keputusan manajemen.

2.1.9 Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Pada sebuah lembaga publik, akuntansi sektor publik adalah sebuah proses untuk mengelompokkan, mencatat, mengategorikan, menganalisis, dan membuat laporan tentang transaksi keuangan dana. Akuntansi sektor publik mengarsipkan informasi keuangan bagi pihak yang membutuhkannya untuk digunakan saat mengambil keputusan, sehingga pengelolaannya harus transparan dan akuntabel.

Menurut *Biduri (2018:1)* Sektor publik adalah entitas yang unik. Organisasi sektor publik juga melakukan transaksi keuangan dan ekonomi, dan mereka

disebut entitas karena memiliki sumber daya ekonomi yang tidak kecil, jika tidak sangat besar. Namun, mereka berbeda dengan entitas ekonomi lainnya, terutama perusahaan komersial yang mencari laba, karena sumber daya ekonomi organisasi sektor publik dikelola bukan untuk mencari laba (nirlaba).

Menurut Majid (2019:2) mengatakan karena Organisasi sektor publik terbesar adalah pemerintah; akuntansi sektor publik juga dapat disebut sebagai akuntansi pemerintah pusat dan daerah. Kejadian dan transaksi keuangan organisasi sektor publik dibahas dalam akuntansi sektor publik. Disebabkan sifat, tujuan, lingkungan, dan standar akuntansi yang berbeda dari organisasi pemerintah, akuntansi privat tidak digunakan untuk organisasi pemerintah.

Biduri (2018:2) mengatakan bahwa akuntansi sektor publik "merupakan alat informasi baik bagi manajemen pemerintah maupun publik". Menurut Bastian dalam Biduri (2018:2) Teknik dan analisis aritmatika yang digunakan untuk pengelolaan dana publik di organisasi nasional dan departemen bawahannya adalah definisi akuntansi sektor publik, dan nan termasuk juga di dalamnya adalah pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial pada proyek kerjasama sektor publik dan swasta. Dalam beberapa literatur Anglo-Amerika, akuntansi sektor publik digambarkan sebagai mekanisme akuntansi swasta yang diterapkan pada praktik organisasi publik. Beberapa buku lama di Eropa Barat menyebut akuntansi sektor publik sebagai akuntansi pemerintah atau akuntansi keuangan publik. Berdasarkan dampak keberhasilan pengenalan akuntansi akrual di Selandia Baru, akuntansi sektor publik kemudian dipahami sebagai akuntansi dana publik (Bastian, 2006).

Secara konseptual, perbedaan antara akuntansi publik dan swasta terletak

pada tujuan yang ingin dicapai. Selama tahap perencanaan, organisasi sektor swasta fokus pada memaksimalkan keuntungan perusahaan. Organisasi sektor publik, di sisi lain fokus pada kepentingan publik. Secara singkat, pada tabel berikut ini menunjukkan bagaimana akuntansi di sektor swasta dan sektor publik berbeda.

Tabel 2.1 Perbedaan Akuntansi Sektor Publik dengan Sektor Swasta

| Perbedaan | Akuntansi Sektor | |
|------------|--------------------------------|------------|
| | Publik | Swasta |
| Tujuan | Kesejahteraan Masyarakat | Keuntungan |
| Organisasi | Sektor Publik | Swasta |
| Keuangan | Negara, Daerah, dan Masyarakat | Individual |

Sumber: Bastian, 2006

Menurut Majid (2019:2) akuntansi sektor publik didefinisikan sebagai "proses mengidentifikasi, mengukur, mencatat, dan melaporkan transaksi ekonomi (keuangan) dan pemerintah, LSM, dan organisasi atau badan publik lainnya. Ini digunakan sebagai informasi oleh pihak-pihak yang membutuhkannya untuk mengambil keputusan ekonomi."

Menurut Hantono (2014:1) akuntansi sektor publik bertujuan untuk menjamin transparansi kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hak-haknya, dan jenis akuntansi ini juga diperlukan di sektor publik yang terkait dengan akuntansi ini. Sektor publik terdiri dari banyak jenis organisasi yang berbeda, seperti lembaga pemerintah daerah, lembaga pemerintah pusat, lembaga non-pemerintah, perusahaan milik negara, rumah sakit, dan lembaga pendidikan.

Berdasarkan definisi di atas, akuntansi sektor publik mengacu pada pengklasifikasian, pencatatan, dan pengukuran transaksi, jumlah, dan peristiwa yang sejenis dengan menggunakan berbagai metode tertentu dalam laporan administrasi pemerintahan berdasarkan prinsip. Dapat kita simpulkan bahwa itu adalah suatu proses pengikhtisarian otonomi dan pelayanan pembantu berdasarkan prinsip otonomi dan lembaga Indonesia.

2.1.10 Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik

Melalui munculnya berbagai komponen pendukung yang mendukung proses pembentukan, akuntansi sektor publik muncul, pertama, sistem kabinet parlementer Indonesia. Oleh karena itu, muncullah sistem akuntansi sektor publik yang pelaksanaannya tunduk pada *checks and balances* di bawah pengaruh badan eksekutif dan legislatif. Elemen dua ialah segala sesuatu yang berguna dan mempunyai nilai ekonomi yang berhubungan sebagai agunan atas hasil, bersama komponen belakang yang mempengaruhi ialah perihal strategi negeri nan dinegosiasikan oleh pemerintah dan lembaga legislatif. Sangat jelas bahwa akuntansi area umum adalah sektor penting pada tatanan pemerintahan dan perniagaan suatu negeri. Jika diskusi tentang akuntansi sektor publik di pemerintahan dibatasi, ini akan berdampak pada regulasi praktik akuntansi sektor itu sendiri.

Ruang lingkup akuntansi sektor publik lebih luas dibandingkan akuntansi sektor swasta. Cabang akuntansi sektor publik ini mencakup berbagai bidang untuk kepentingan publik. Akuntansi sektor publik meliputi:

1. Perancangan finansial beserta pengembangan
2. Skema inspeksi dan eksplorasi

3. Keterkaitan finansial beserta kebijaksanaan pemerintahan

Selain itu, akuntansi sektor publik berada di bawah yurisdiksi lembaga pemerintah yang lebih tinggi dan subdivisinya, pemerintah daerah, yayasan, partai politik, universitas, dan organisasi lainnya. Namun, organisasi sektor publik hanya terbatas pada organisasi yang menggunakan dana publik. Maka dari itu akuntansi sektor publik hanya mencakup bidang utama sebagai berikut:

1. Akuntansi Pemerintah Pusat
2. Akuntansi Pemerintah Daerah
3. Akuntansi Partai Politik
4. Akuntansi LSM
5. Akuntansi Yayasan
6. Akuntansi Pendidikan
7. Akuntansi Kesehatan
8. Akuntansi Tempat Peribadatan

2.1.11 Karakteristik Akuntansi Sektor Publik

Menurut Hantono (2014:3) Akuntansi sektor publik biasanya digunakan oleh lembaga pemerintah daerah dan pusat, dan karakteristiknya berfokus pada dua hal:

1. Fokus pada karakteristik lembaga ini adalah khusus untuk organisasi nonprofit, seperti lembaga pemerintahan.
2. Fokus pada tujuan lembaga, di mana fokus sektor publik hanya menyediakan informasi tentang layanan publik yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pendapat Biduri (2018:5) menyebutkan Akuntansi adalah aktivitas yang

dilakukan dengan tujuan untuk mencapai tujuan tertentu dan harus menghasilkan manfaat. Akuntansi perusahaan swasta dan publik berbeda dalam beberapa hal. Jenis akuntansi yang berbeda dipengaruhi oleh variabel lingkungan dan komponen lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor publik meliputi:

1. Faktor ekonomi termasuk pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tenaga kerja, nilai tukar mata uang, infrastruktur, dan jaringan internasional. Pertumbuhan pendapatan per kapita (GNP/GDP).
2. Faktor politik termasuk hubungan antara negara dan masyarakat, tipe rezim yang berkuasa, ideologi negara, elit politik dan massa, jaringan internasional, dan kelembagaan.
3. Faktor kultural termasuk keragaman suku, ras, dan etnis.

2.1.12 Tujuan Akuntansi Sektor Publik

American Accounting Association dalam Yuesti (2020:4) mengemukakan bahwa tujuan akuntansi pada organisasi sektor publik adalah untuk:

1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengalokasikan sumber daya yang dapat diandalkan secara tepat, efisien, dan ekonomis. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen
2. Memberikan informasi yang memungkinkan manajer melaporkan tugas mengelola program dan penggunaan sumber daya secara tepat dan efektif, serta memungkinkan pegawai pemerintah melaporkan kepada publik tentang hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik serta tujuan ini terkait dengan akuntabilitas.
3. Akuntansi sektor publik memberikan informasi kepada pemerintah dan masyarakat. Perencanaan strategis, penganggaran, evaluasi kinerja, dan

pelaporan kinerja adalah beberapa contoh bagaimana pemerintah menggunakan data akuntansi untuk pengendalian manajemen.

Menurut Majid (2019:11) akuntansi sektor publik bertujuan untuk:

1. Penyedia informasi untuk pengendalian dan akuntabilitas manajemen.
2. Saat pengambilan keputusan, data akuntansi membantu manajer mengatur sumber daya mereka.
3. Informasi akuntansi digunakan untuk menentukan biaya yang dikeluarkan untuk suatu usaha serta kelayakannya secara ekonomis atau teknis. 3. Informasi digunakan untuk memilih program penilaian investasi mana yang tepat, efektif, dan ekonomis. Untuk penilaian kinerja sektor publik, data akuntansi juga sangat penting.

2.1.13 Tahapan Sistem Informasi Akuntansi Sektor Publik

Menurut Ningsih (2017:183) Sistem informasi akuntansi publik digunakan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui serangkaian tindakan mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan keuangan. Menurut Damayanti (2020:96) akuntansi pemerintahan adalah salah satu penggunaan akuntansi sektor publik dalam bidang keuangan negara, terutama dalam hal proses pelaksanaan anggaran, diawali dengan pengesahan APBD oleh Kepala Daerah Bersama DPRD, maka Sekda menetapkan DPA masing-masing OPD. Atas dasar DPA maka BUD/PPKD menetapkan SPD masing-masing OPD. Sehingga realisasi belanja OPD dapat diajukan oleh bendahara pengeluaran dalam bentuk SPP (UP, GU, TU) dan oleh PPTK dalam bentuk SPP-LS. Selanjutnya PPK akan memverifikasi agar SPP dapat menjadi SPM yang ditanda tangan oleh Kepala

Daerah. Kemudian dapat dicairkan melalui SP2D (tunai/transfer) berdasarkan SP2D yang terbit maka input belanja dapat dijurnal dengan menggunakan aplikasi sesuai dengan kode rekening. Dan diakhir periode/tahun dapat menghasilkan laporan keuangan OPD.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Adapun penelitian sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2 Mapping Penelitian Sebelumnya

| No | Nama/Tahun | Judul | Variabel | Teknik analisis | Hasil |
|----|-------------------------|---|----------------------------------|-----------------|---|
| 1. | Andivo & Silvera (2020) | Analisis Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada Badan Kepegawaian Daerah (Bkd) Kabupaten Pesisir Selatan | Sistem Akuntansi Keuangan Daerah | Deskriptif | Peraturan Menteri Dalam Negeri No.21 tahun 2011 menetapkan bahwa Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Pesisir Selatan menggunakan sistem akuntansi keuangan daerah. Ini memungkinkan laporan pertanggungjawaban yang cepat, akurat, relevan, dan transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan tepat waktu. |

| | | | | | |
|----|--------------------|--|--|------------|--|
| 2. | Syairozi (2021) | Analisis Penerapan Good Governance Dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah | Good Governance Dalam Sistem Informasi | Deskriptif | Peraturan Pemerintah Nomor 56/ 2005 mewajibkan pemerintah daerah untuk menerapkan sistem informasi keuangan daerah (SIKD). Pada dasarnya, semua informasi yang diberikan oleh pemerintah daerah terdiri dari akuntansi keuangan sistem daerah, yang diatur dan dipresentasikan |
|----|--------------------|--|--|------------|--|

| | | | | | |
|----|-------------------|--|------------------------------------|------------|---|
| | | | | | <p>menurut standar akuntansi pemerintah. Akibatnya, SIKD bertujuan untuk membantu kepala daerah pemerintah mengelola dan memikul tanggung jawab keuangan daerah dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tata kelola yang baik. Jika SIKD berjalan dengan baik, tata kelola daerah pemerintah yang baik akan terwujud. Sayangnya, kenyataannya masih jauh dari yang diharapkan karena beberapa masalah bersamaan.</p> |
| 3. | Makitulung (2019) | Analisis Sistem Dan Prosedur Akuntansi Aset Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe | Sistem Dan Prosedur Akuntansi Aset | Deskriptif | <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntansi aset Kabupaten Kepulauan Sangihe dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan sistem akuntansi pemerintah.</p> |

| | | | | | |
|----|---------------------------|--|--|------------|--|
| 4. | Novita & Nurdiwaty (2017) | Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Pegawai Negeri Sipil Pada Uptd Smpn 1 Purwoasri Kabupaten Kediri | Sistem Informasi Akuntansi | Deskriptif | Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur organisasi sumber daya manusia (SDM) UPTD SMPN 1 Purwoasri, yang mencakup Operator Sekolah, Administrasi Kepegawaian, Administrasi Keuangan/Pembiayaan, dan Sistem Informasi Akuntansi Penggajian, cukup baik. Flowchart pembayaran pegawai ini dibuat sesuai dengan SOP Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015. |
| 5. | Yanto & Afkir (2020) | Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (Simda Keuangan) Dalam Pengolahan Data Keuangan Pada Organisasi Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tolitoli) | Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah | Deskriptif | Dengan nilai rata-rata tertimbang sebesar 3,45 satuan sesudah menggunakan SIMDA Keuangan, dibandingkan dengan nilai rata-rata tertimbang sebesar 2,00 satuan sebelum menggunakan SIMDA Keuangan, kualitas informasi di Dinas Lingkungan Hidup lebih baik dari sebelumnya, menurut skala pengukuran menggunakan data ordinal. |

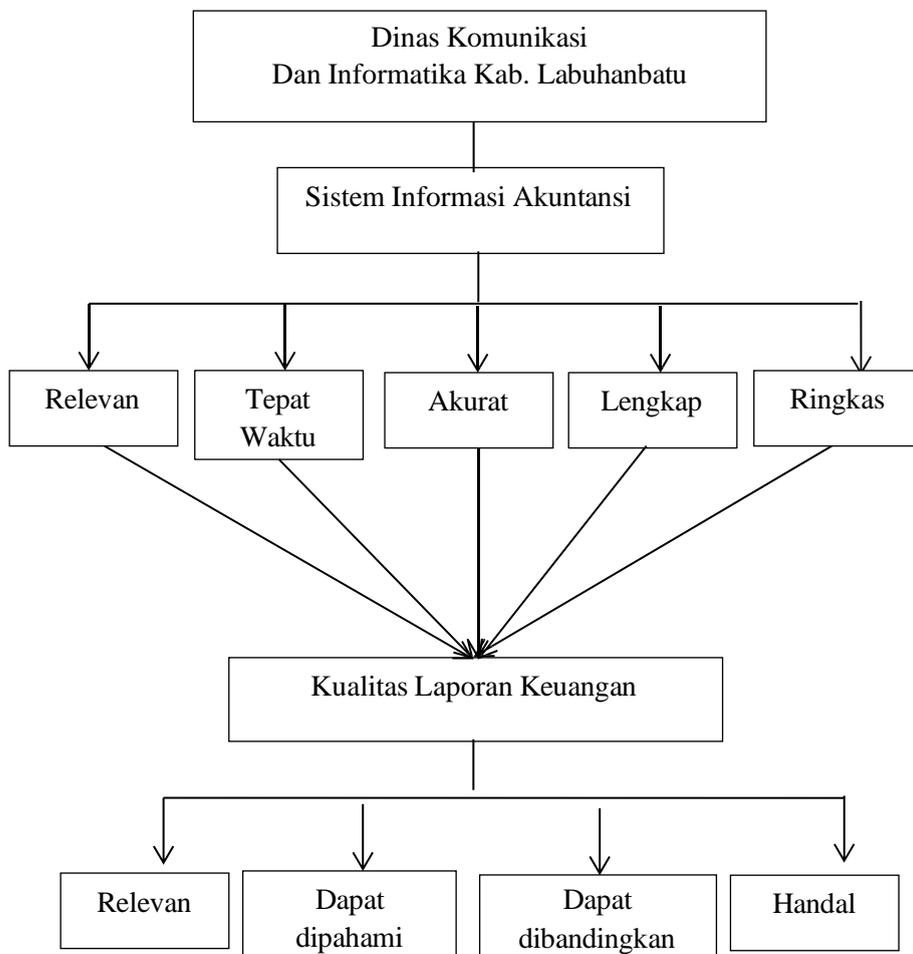
Sumber: Diolah Penulis, 2022

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir adalah skema konseptual yang menjelaskan bagaimana sebuah teori berinteraksi dengan berbagai komponen yang ditentukan sebagai masalah utama.

Adapun model kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Gambar 2.3 Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah dengan kualitatif yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang status gejala yang ada, yaitu informasi tentang status gejala pada saat penelitian dilakukan. Menurut Sugiono (2018:18) Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang didasarkan pada filosofi post-positivis yang digunakan untuk mempelajari keadaan objek alami, alat penting bagi peneliti (sebagai lawan dari eksperimen). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi (kombinasi) dan analisis data induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif menekankan pada pentingnya pemaknaan dibandingkan generalisasi.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

3.2.1 Tempat Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu terletak di Jalan Goose Gautama Nomor 3, Kabupaten Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar.

3.2.2 Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada bulan Mei 2023 hingga November 2023 seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2 Skedul Proses Penelitian

| No | Kegiatan | 2023 | | | | | | | | 2024 | | | | |
|----|--------------------|------|-----|------|------|------|------|-----|-----|------|-----|------|------|-----|
| | | Aprl | Mei | Juni | Juli | Agst | Sept | Nov | Des | Jan | Feb | Mart | Aprl | Mei |
| 1 | Pengajuan Judul | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Acc Judul | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Pengambilan data | | ■ | | | | | | | | | | | |
| 4 | Penulisan Proposal | | ■ | | | | | | | | | | | |
| 5 | Bimbingan Proposal | | ■ | | | | | | | | | | | |
| 6 | ACC Penelitian | | | ■ | | | | | | | | | | |
| 7 | Seminar Hasil | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 8 | Sidang Meja Hijau | | | | | | | | | | | | | ■ |

3.3 Defenisi Operasional

Untuk menyeimbangkan pemahaman terhadap variabel konseptual yang digunakan, penulis memberikan definisi operasional sebagai berikut:

Tabel 3.3 Definisi Operasional

| Variabel | Definisi | Indikator | Skala |
|----------------------------|---|--|-----------|
| Sistem informasi akuntansi | sebuah sistem yang dapat mengumpulkan, mencatat, menyimpan dan pemrosesan suatu data dan menjadikan sebuah informasi bagi para pembuat keputusan. | Relevan Tepat Akurat Ringkas Lengkap | Wawancara |

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

1. Data Primer

Data ini adalah informasi yang dikumpulkan secara lisan atau tulisan tentang sistem informasi akuntansi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari data sebelumnya atau dari literatur, tulisan ilmiah, atau sumber lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian disebut data sekunder.

3.4.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber internal yaitu wawancara dengan Kasubag Program Keuangan Bapak Rahmad Yunus Daulay dan Staff Keuangan Bapak Syahrul Bahri Siregar di bagian keuangan Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Labuhanbatu.

3.5 Metode Mengumpulkan Bahan

Metode mengumpulkan bahan pada pengkajian ialah dengan:

1. Teknik Wawancara

Metode Wawancara yaitu bersama melakukan diskusi bertanya saat itu juga kepada dua responden Kasubag Program Keuangan Bapak Rahmad Daulay dan staff Program Keuangan Bapak Syahrul Bahri Siregar.

2. Teknik Observasi

Teknik observasi yaitu dengan melakukan pengamatan langsung terhadap implementasi sistem informasi akuntansi oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Kab. Labuhanbatu.

3.6 Teknik Analisis Data

Sugiono (2015:335) Analisis deskriptif didefinisikan sebagai "proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang

penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain". Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini sesuai dengan pendapat Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2015:337) yaitu:

1. Pengumpulan Informasi

Pengumpulan informasi melalui pengumpulan data dari Dinas Komunikasi Dan Informatika Kab. Labuhanbatu

(Trisnawati., 2018)

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan komponen analisis yang pertama adalah proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengabstraksi data yang tersedia.

3. Penyajian Data

Penyajian data berarti sekumpulan informasi, yang disusun secara logis dan sistematis, berkaitan dengan suatu masalah yang dirumuskan sebagai masalah penelitian, yaitu penjelasannya dalam bentuk cerita. Penyajian data merupakan penjelasan rinci tentang kriteria untuk mengidentifikasi dan menjawab pertanyaan penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam memahami penjelasan fenomena-fenomena yang ada pada objek kajian.

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Data yang diperoleh pada awal penelitian sebenarnya sudah konklusif. Kesimpulan yang awalnya tidak jelas dan tentatif, namun kemudian, melalui proses analisis data, kesimpulan tersebut berkembang menjadi kesimpulan yang kokoh, atau pernyataan yang memiliki landasan yang kokoh. Fase ini mengkaji makna pola penjelasan, kemungkinan konfigurasi, dan hubungan sebab akibat dari

pernyataan. Tarik kesimpulannya secara cermat dengan validasi berupa catatan lapangan untuk menjamin keabsahan data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Dinas Kominfo Kabupaten Labuhanbatu

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu berlokasi di Lingkungan Gedung Kantor Bupati Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu, dengan visi menjadi Pusat Pelayanan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu. Untuk mewujudkan visi tersebut, misi Otoritas Komunikasi dan Informasi adalah:

1. Penyediaan jasa komunikasi dan teknologi penerbitan informasi kualitas melalui sistem tata kelola yang sehat dan independen.
2. Pelayanan prasarana, penyediaan kemampuan penunjang infrastruktur komunikasi informasi.
3. Menyediakan sistem/aplikasi TI dan konten digital untuk pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan daerah.
4. Menjadi pusat regional untuk berita dan kerjasama media online/cetak.
5. Meningkatkan sumber daya manusia aparatur sipil negara dan masyarakat di bidang teknologi komunikasi dan informasi
6. Implementasi ekosistem ICT smart city di Kabupaten Labuan Batu.

Berdasarkan visi dan misi ini, maka tugas pokok dan fungsi Dinas Kominfo Kabupaten Labuhanbatu adalah:

1. Sekretariat

a. Tugas:

Melaksanakan beberapa tanggung jawab Kepala Dinas Komunikasi Informatika, termasuk urusan umum, kepegawaian, dan keuangan, serta mengatur program kegiatan, pelayanan teknis, dan administrasi untuk seluruh organisasi.

b. Fungsi:

- 1) Mengorganisasikan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas;
- 2) Menyelenggarakan dan melakukan pelayanan tata usaha dan rumah tangga;
- 3) Melaksanakan rencana anggaran belanja;
- 4) Mengelola urusan keuangan;
- 5) Membuat rancangan peraturan dan kebijakan pelaksanaan yang berkaitan dengan tugas pokok Dinas;
- 6) Mengelola administrasi kepegawaian, umum, surat menyurat, rumah tangga, perlengkapan, dan kehilangan; dan
- 7) Mengawasi pelaksanaan administrasi kepegawaian, umum, surat menyurat.

2. Bidang Teknologi informasi

a. Tugas :

Ada beberapa bagian pelayanan yang berkaitan dengan tata kelola sistem *e-Government*, seperti menyiapkan bahan untuk perumusan dan pelaksanaan kebijakan, mengembangkan norma, standar, prosedur, dan kriteria, memberikan bimbingan teknis dan supervisi, memantau, mengevaluasi, dan melaporkan tugas.

b. Fungsi:

- 1) Untuk layanan infrastruktur dasar *Data Center*, Pusat Penanggulangan Bencana dan Teknologi Informasi Komputer Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu,

Akses Internet dan Intranet, Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Manajemen Data Informasi *e-Government*, Spesifik dan Suplemen yang terintegrasi, Integrasi Layanan Publik dan Pemerintahan, Keamanan Informasi *e-Government*, dan Sistem Komunikasi.

2) Penyiapan bahan untuk penyusunan standar, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan untuk layanan infrastruktur dasar *Data Center*; Pusat Penanggulangan Bencana dan Teknologi Informasi Komputer Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu; Akses Internet dan Intranet; Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik; Manajemen Data Informasi *e-Government*; Suplemen dan Spesifik yang Terintegrasi; Integrasi Layanan Publik dan Pemerintahan; dan Keamanan Informasi.

3) Bimbingan teknis dan pengawasan yang berkaitan dengan layanan berikut: Infrastruktur dasar Pusat Data; Pusat Penanggulangan Bencana dan Teknologi Informasi Komputer Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu; Akses Internet dan Intranet; Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik; Manajemen Data Informasi *e-Government*; Suplemen dan Spesifik yang Terintegrasi; Integrasi Layanan Publik dan Pemerintahan; dan Keamanan Informasi *e-Government*;

4) Layanan infrastruktur dasar *Data Center*, Pusat Penanggulangan Bencana dan Teknologi Informasi Komputer Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Layanan Akses Internet dan Intranet, Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Manajemen Data Informasi *e-Government*, Spesifik dan Suplemen yang Terintegrasi, Integrasi Layanan Publik dan Pemerintahan, Keamanan Informasi *e-Government*, dan Sistem Komunikasi Intrusif adalah topik yang terkait dengan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan

5) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.

3. Bidang layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik

a. Tugas:

Membagikan edukasi dan inspeksi teknis, mengamati, menguji, serta memberitahukan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik, dan menyusun bahan untuk perumusan dan pelaksanaan kebijakan.

b. Fungsi:

1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan untuk layanan infrastruktur dasar *Data Center*, Pusat Penanggulangan Bencana dan Teknologi Informasi Komputer Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Layanan Akses Internet dan Intranet, Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Manajemen Data Informasi *e-Government*, Spesifik dan Suplemen yang terintegrasi, Integrasi Layanan Publik dan Pemerintahan, Keamanan Informasi *e-Government*, dan Sistem Komunikasi Intrusif;

2) Penyiapan bahan untuk penyusunan standar, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan untuk layanan infrastruktur dasar *Data Center*, Pusat Penanggulangan Bencana dan Teknologi Informasi Komputer Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu; Akses Internet dan Intranet; Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik; Manajemen Data Informasi *e-Government*; Spesifik dan Suplemen yang Terintegrasi; Integrasi Layanan Publik dan Pemerintahan; Keamanan Informasi; dan Integrasi Layanan Publik dan Pemerintahan.;

3) Penyiapan bahan untuk memberikan bimbingan teknis dan supervisi dalam bidang layanan infrastruktur dasar *Data Center*, Pusat Penanggulangan Bencana

dan Teknologi Informasi Komputer Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, layanan akses internet dan intranet, pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, manajemen data informasi *e-Government*, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, keamanan informasi *e-Government*, dan layanan keamanan informasi *e-Government*;

4) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait dengan layanan infrastruktur dasar *Data Center*, Pusat Penanggulangan Bencana dan Teknologi Informasi Komputer Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu; Layanan Akses Internet dan Intranet; Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik; Manajemen Data Informasi *e-Government*; Spesifik dan Suplemen yang terintegrasi; Integrasi Layanan Publik dan Pemerintahan; Keamanan Informasi *e-Government*; dan Sistem Komunikasi Intrusif.; dan

5) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.

4. Bidang Pelayanan Informasi Publik

a. Tugas:

Melakukan sebagian dari tugas kepala dinas seperti menyusun kebijakan dan pelaksanaannya, membentuk kebiasaan, ukuran patokan, metode, sertakapabilitas, membagikan edukasi dan inspeksi teknis, mengamati, menguji serta memberitahukan pelayanan informasi publik, layanan kehumasan, meningkatkan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan memberikan akses informasi, dan memberikan nama domain dan sub domain untuk lembaga, pelayanan publik, dan kegiatan Kabupaten Labuhanbatu.

b. Fungsi:

1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan untuk layanan informasi publik,

layanan kehumasan, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, layanan publik dan kegiatan Kabupaten Labuhanbatu, pengembangan sumber daya teknologi informasi komputer pemerintah kabupaten dan masyarakat, pengelolaan *Chief Information Officer* (GCIO) pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, dan pengelolaan layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga;

2) Penyiapan bahan untuk pelaksanaan kebijakan pelayanan informasi publik, layanan kehumasan, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, layanan publik dan kegiatan Kabupaten Labuhanbatu, pengembangan sumber daya teknologi informasi komputer pemerintah dan masyarakat, penyelenggaraan *Chief Information Officer* (GCIO) pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, dan penyelenggaraan layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, layanan publik dan kegiatan Kabupaten Labuhanbatu;

3) Penyiapan bahan untuk penyusunan standar, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pelayanan informasi publik, layanan kehumasan, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten Labuhanbatu, pengembangan sumber daya teknologi informasi komputer pemerintah Kabupaten dan masyarakat, dan penyelenggaraan *Chief Information Officer* (GCIO) Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.;

4) Penyiapan bahan untuk bimbingan teknis dan supervisi dalam pelayanan informasi publik, layanan kehumasan, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan nama domain dan

sub domain bagi lembaga, layanan publik dan kegiatan Kabupaten Labuhanbatu, pengembangan sumber daya teknologi informasi komputer pemerintah Kabupaten dan masyarakat, dan penyelenggaraan *Chief Information Officer* (GCIO) pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.;

5) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tentang layanan informasi publik; layanan kehumasan; penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi; nama domain dan sub domain untuk lembaga, layanan, dan kegiatan publik Kabupaten Labuhanbatu; pengembangan sumber daya teknologi informasi komputer pemerintah dan masyarakat Kabupaten Labuhanbatu; penyelenggaraan Chief Information Officer (GCIO) pemerintah Kabupaten Labuhanbatu; dan penyelenggaraan layanan nama domain dan sub domain untuk lembaga, layanan, dan kegiatan publik.

4.1.2 Struktur Organisasi

Manajemen yang baik dapat dibangun ke dalam struktur organisasi, karena struktur organisasi dapat menunjukkan pola hubungan antara fungsi, bagian, posisi dan orang yang melakukan dengan perbedaan peran, tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam lingkungan manajemen suatu organisasi dan menurut Rohmah (2019:3) struktur organisasi didefinisikan bagaimana tugas yang akan dialokasikan, yang melaporkan kepada siapa, dan mekanisme koordinasi formal dan patterns interaksi yang akan diikuti. Berikut adalah struktur organisasi Dinas Kominfo Labuhanbatu:

Gambar 4.1 Struktur Organisasi



4.1.3 Gambaran Sistem Informasi Akuntansi Pada Kominfo Labuhanbatu

Pengelolaan laporan penggunaan anggaran pada Dinas Kominfo Labuhanbatu, sangat terbantu dengan adanya sistem aplikasi pembuatan laporan keuangan yang terintegrasi langsung. Sistem informasi mencakup seluruh proses akuntansi mulai dari catatan sampai dengan menginput transaksi berdasarkan tanggal terjadinya yang kemudian secara otomatis akan diproses dan dilanjutkan hingga tersedianya laporan penggunaan anggaran.

Dilihat dari tampilan dan perangkat aplikasi sistem informasi akuntansi dapat disimpulkan bahwa aplikasi sistem informasi yang disajikan sudah cukup memadai, yakni:

1. Perencanaan dan penganggaran

Menu ini untuk memasukkan item-item yang diperlukan untuk penganggaran dan pelaksanaan pada tahun berikutnya. Kelebihan menu ini adalah:

- a. Pegawai dapat merencanakan pengadaan barang-barang penting dengan lebih baik dan canggih untuk keperluan dinas;
- b. Desain yang baik meningkatkan efisiensi dan efektivitas saat membeli barang modal.

2. Pengadaan

Pada menu ini, pegawai dapat memasukkan informasi tentang kontrak dan perincian aset yang termasuk dalam kontrak untuk memperoleh informasi atas kesepakatan yang dibuat oleh Dinas Kominfo.

3. Penggunaan

Pada menu ini, pegawai dapat mencantumkan Surat keputusan penggunaan barang

4. Penatausahaan

Setiap barang diberi kode pendaftaran yang berbeda. Kode registrasi adalah pengidentifikasi unik untuk setiap barang. Dengan adanya kode ini, maka kode pendaftaran barang yang bersangkutan dapat ditentukan secara langsung sehubungan dengan perencanaan, perolehan, atau pemusnahan, sehingga tidak ada lagi satu produk dengan beberapa kode registrasi.

5. Pemakaian

Tujuan dari laporan pemakaian setiap jenis barang adalah untuk melacak barang yang sudah sampai kategori pemakaian, mengetahui dimana letak barang, kapan kontrak berakhir dan kerjasama para pihak untuk meminimalisir kerugian yang mungkin terjadi.

6. Pemeliharaan

Menu ini digunakan untuk memasukkan informasi perawatan ringan dan sedang yang tidak termasuk dalam kategori ukuran sistem. Melaporkannya dalam

daftar pemeliharaan aset tetap dibuat. Menu ini berguna sebagai informasi perawatan untuk setiap barang, biaya pemeliharaan terkendali tanpa penganggaran untuk pemeliharaan berulang dengan barang yang sama dan mengetahui daftar kontrak pemeliharaan.

7. Penghapusan

Laporan pada menu ini merupakan lampiran surat keputusan menghapus barang dari data inventaris.

8. Akuntansi

Manajemen barang terkait erat dengan keuangan. Oleh karena itu perlu dilakukan rekonsiliasi secara berkala antara data keuangan dengan informasi barang. Jadi, untuk memfasilitasi rekonsiliasi sistem informasi akuntansi secara otomatis menugaskan kelompok material ke kategori aset di neraca. Dengan bantuan penjelasan tersebut diharapkan adanya kesamaan informasi data aset antara pengelola barang dan pengelola keuangan.

4.2 Pemahaman pegawai dan masalah pada sistem informasi akuntansi

Fitur utama sistem informasi akuntansi merupakan sistem komputer yang didesain dalam mendukung proses pengolahan data penggunaan anggaran pada Dinas Kominfo Labuhanbatu, namun pegawai yang terkait dengan proses pengoperasian sistem informasi akuntansi pada Dinas Kominfo Labuhanbatu belum semua mengerti atas pengoperasian sistem informasi akuntansi ini. Hal ini diketahui dari hasil wawancara dengan Bapak Rahmad Yunus Daulay dan Bapak Syahrul Bahri siregar yang mengatakan bahwa dalam penginputan data sering ditemukan kesalahan dari pegawai dalam memasukkan nomor kontrak ke fitur aplikasi. Selain itu, sistem informasi akuntansi merupakan aplikasi online.

Prosedur dan Fungsinya menggunakan jaringan internet dan jika jaringan internet tidak stabil atau listrik padam kinerja pegawai akan terganggu.

4.2.1 Ketepatan waktu dalam menghasilkan laporan keuangan

Ketepatan waktu dalam menghasilkan laporan keuangan merupakan sesuatu yang sangat penting karena dengan tepat waktu akan mengakomodir kecepatan dalam mengambil keputusan namun menurut hasil wawancara bahwa laporan keuangan masih sering terlambat karena keterbatasan sumber daya manusia dalam mengami sistem dan kendala jaringan.

4.2.2 Laporan keuangan menghasilkan informasi yang jujur dan wajar

Laporan keuangan dianggap andal jika mencerminkan realitas dan isi transaksi bebas tanpa ada penyimpangan dan di mana ada ketidakpastian disitu ada prinsip kehati-hatian yang diperlukan dalam mengungkapkan penilaian dan prinsip ini dinyatakan secara eksplisit. Laporan keuangan mengandung informasi yang mendeskripsikan transaksi dan peristiwa lainnya secara akurat yang harus disajikan atau secara wajar dapat diharapkan melayani. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rahmad Yunus Daulay dan Bapak Syahrul Bahri siregar telah penyajian telah dilakukan dengan jujur dan wajar.

4.2.3 Laporan keuangan menghasilkan informasi yang dapat diverifikasi dan netral

Informasi yang dihasilkan dalam sistem informasi akuntansi pada Dinas Kominfo Labuhanbatu dapat diverifikasi yang artinya laporan keuangan memberikan informasi yang dapat diverifikasi, dan ketika audit dilakukan lebih dari satu kali oleh pihak yang berbeda, hasilnya harus tetap mengarah pada kesimpulan yang sama. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rahmad

Yunus Daulay dan Bapak Syahrul Bahri Siregar mengatakan kemampuan pengendalian laporan keuangan menunjukkan dua indikator yakni informasi yang masuk ke dalam sistem pada proses pengendalian awal dan pemrosesan data transaksi laporan keuangan dapat dilakukan melalui proses rekonsiliasi dengan benar dan terverifikasi dengan baik.

Netral artinya laporan keuangan memuat informasi yang ada berorientasi pada pemuasan kebutuhan umum dan tidak bias kebutuhan beberapa pihak. Berdasarkan hasil wawancara bahwa laporan keuangan sudah masuk dilakukan adalah kebutuhan untuk masyarakat umum, tidak ada pada pihak tertentu lingkungan tertentu. Hal ini sesuai dengan prinsip anggaran pendapatan dan belanja daerah dan dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa akun tahunan adalah dimuat terlepas dari perspektif kepentingan pihak tertentu.

4.2.4 Laporan keuangan menghasilkan informasi yang dapat dibandingkan dan dipahami

Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan dapat dibandingkan satu sama lain dengan laporan keuangan sebelumnya dengan praktik akuntansi yang sama. Jika menerapkan prinsip akuntansi yang berbeda kebijakan akuntansi periode sebelumnya, perubahan tersebut harus disajikan dalam periode akuntansi dimana perubahan itu terjadi. Hasil wawancara dengan Bapak Rahmad Daulay dan Bapak Syahrul Bahri siregar, mengatakan bahwa laporan keuangan yang disusun dapat dibandingkan dengan laporan keuangan tahunan periode sebelumnya. Laporan keuangan yang dihasilkan relatif mudah dipahami oleh pengguna dan relatif dapat disajikan dalam format dan ungkapan yang disesuaikan dengan batas pemahaman pengguna.

4.3 Pembahasan

Laporan kegiatan keuangan yang dimasukkan adalah laporan realisasi penggunaan anggaran. Laporan keuangan juga merupakan laporan keuangan bulan sebelumnya. Artinya, jika laporan keuangan pada bulan Januari, maka akan dilaporkan pada bulan Februari. Fenomena ini menunjukkan bahwa masih terdapat keterlambatan pada sistem informasi yang ada. Pelaporan aktivitas keuangan yang tidak tepat waktu membahayakan keakuratan informasi yang diperlukan. Hal ini mempengaruhi proses pengambilan keputusan.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara, teridentifikasi beberapa kendala terkait implementasi sistem informasi yang ada, seperti: kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang kurang dalam pengelolaan sistem informasi akuntansi. Penggunaan sistem informasi akuntansi dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan memerlukan keterampilan pegawai yang baik, karena sistem informasi akuntansi adalah mesin yang tidak dapat berfungsi tanpa manusia. Oleh karena itu, kompetensi sumber daya manusia merupakan prasyarat yang diperlukan untuk menggunakan sistem informasi akuntansi. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor terpenting yang menjadi dasar keberhasilan penerapan sistem informasi akuntansi, sehingga kualitas dan kuantitas sumber daya manusia itu sendiri juga menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan.

Kekurangan sumber daya manusia pada Dinas Kominfo Labuhanbatu dari segi jumlah dan keahlian, masih sedikit yang memahami penerapan sistem informasi akuntansi, terbukti dengan rata-rata latar belakang pendidikan yang bukan dari akuntansi. Secara tidak langsung yang tidak memiliki kompetensi tersebut, baru mendapatkan pengetahuan mengenai sistem informasi akuntansi

setelah mengikuti beberapa pelatihan. Kendala berikutnya adalah jaringan yang sering terganggu, hal ini sudah menjadi faktor jendala yang tidak bisa di tolak namun dilakukan minimalisir dengan penambahan jaringan melalui provider yang berbeda.

Organisasi harus mempekerjakan orang-orang yang berpendidikan, berpengalaman dan terampil di semua tingkatan, dari manajemen senior, menengah dan bawah, untuk mencapai hasil informasi yang berkualitas, karena menghasilkan sistem informasi yang berkualitas membutuhkan orang-orang yang terampil. Sebagai organisasi sektor publik, agar dapat beroperasi secara efisien, efektif, transparan dan bersih, instansi memerlukan dukungan sistem informasi akuntansi yang memadai sehingga informasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. instansi harus mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi pemerintahan dan *workflow* yang memungkinkan instansi bekerja secara terintegrasi dengan menyederhanakan akses antar unit kerja untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan.

Akuntansi sektor publik tentu memiliki transaksi yang kompleks dan volume yang tinggi. Penggunaan teknologi informasi memberikan kontribusi penting untuk mempercepat pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan publik sehingga laporan keuangan tersebut tidak kehilangan nilai informasinya. Proses sistem informasi akuntansi terdiri dari input, proses dan output. Informasi tersebut dimasukkan ke dalam sistem informasi untuk diproses. Data adalah fakta yang dikumpulkan dan diproses oleh sistem informasi. Oleh karena itu, data yang bermakna dan berguna harus diproses dan diubah menjadi

bentuk yang bermakna, teratur, dan berguna yang disebut informasi. Output adalah informasi yang bermakna dan berguna yang dihasilkan oleh sistem informasi. Sistem Informasi akuntansi adalah perangkat lunak yang tujuannya untuk membantu instansi daerah dalam mengelola keuangannya secara efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan, mulai dari penganggaran, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan.

Semua sumber data, baik internal maupun eksternal perusahaan, dikonsolidasikan dan disimpan dalam satu database. Selanjutnya seluruh data dalam bentuk database diubah menjadi informasi yang lebih berharga bagi seluruh pengguna informasi melalui perangkat lunak. Data tersebut kemudian diubah menjadi informasi dan diberikan kepada semua pengguna yang membutuhkannya, seperti administrasi dan pengguna internal dan eksternal perusahaan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan diketahui bahwa Dinas Kominfo saat ini mengoperasikan sistem informasi akuntansi dimana aplikasi tersebut dapat menjawab segala kebutuhan informasi terkait penganggaran dan membantu dalam pengambilan keputusan.

Informasi keuangan yang ada dapat diuji dan diketahui kebenarannya, karena informasi keuangan merupakan salah satu informasi penting yang akan berguna bagi pihak-pihak terkait dalam pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Selain itu, ditemukan bahwa penjelasan nan tercantum pada informasi finansial sangat berguna jika dipadankan bersama informasi finansial rentang waktu terdahulu ataupun bersama informasi finansial substansi penginformasian beda dari biasanya. Perbandingan internal dimungkinkan jika lembaga menerapkan prinsip akuntansi yang sama setiap tahunnya. Perbandingan

eksternal dimungkinkan jika institusi yang dibandingkan menggunakan prinsip akuntansi yang sama. Bila substansi umum bermaksud untuk menerapkan standar akuntansi yang lebih baik daripada yang diterapkan saat ini, perubahan tersebut akan tercermin dalam periode akuntansi di mana perubahan tersebut terjadi.

Direktur sumber daya juga menyatakan bahwa informasi yang terkandung dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan disajikan dalam format dan terminologi yang sesuai dengan batas pemahaman pengguna. Oleh karena itu, diasumsikan bahwa pengguna memiliki informasi yang cukup tentang operasi dan lingkungan pengoperasian serta bersedia meninjau informasi yang relevan.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa komponen kualitas laporan keuangan terpenuhi yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 disebutkan bahwa laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang memiliki karakteristik; (1) relevan, informasi yang terkandung di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu atau sekarang dan memprediksi masa depan dan mengkonfirmasi atau memperbaiki hasil evaluasi masa lalu, (2) dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan bebas dari asumsi yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan semua fakta secara wajar dan dapat diverifikasi (3) dapat diperbandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau secara umum dengan laporan keuangan entitas pelaporan lainnya, (4) dapat dipahami oleh pengguna serta dinyatakan dalam istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman pengguna untuk mempelajari informasi.

Dinas Kominfo harus mampu menyajikan laporan keuangan yang sesuai

dengan standar akuntansi dan harus memiliki laporan keuangan yang berkualitas. Tujuan pelaporan keuangan sektor publik adalah untuk menyajikan informasi yang relevan dengan pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan penggunaan sumber daya yang dipercayakan oleh rakyat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang disajikan maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sistem informasi akuntansi di dinas kominfo masih mengalami ketidak ketepatan waktu, hal ini sering terjadi saat memasukkan data sehingga sistem informasi akuntansi yang ada saat ini belum memberikan dampak positif terhadap informasi yang akurat dan tepat waktu.
2. Dinas kominfo Labuhanbatu memenuhi persyaratan indikator yang diperlukan untuk laporan keuangan sektor publik, yakni berkualitas karena dapat diandalkan, dapat dibandingkan, serta dapat dipahami.

5.2 Saran

1. Pentingnya mempertahankan dan meningkatkan kualifikasi sumber daya manusia karena sumber daya manusianya yang berkualitas dan kompeten diperlukan untuk bekerja lebih baik dengan sistem informasi akuntansi.
2. Dinas kominfo Labuhanbatu harus memperhatikan sistem akuntansi yang digunakan terkait dengan disiplin waktu penyampaian jadwal laporan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan sehingga pengolahan data keuangan dapat berlangsung dan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdiyanto, et al. 2023. The development economic growth for sustainable development with augmented dickey fuller (empirical study for neoclassical economic growth from solow and swan). *Kurdish Studies*, 11(2), pp. 3206-3214
- Andivo, F. &. (2020). *Analisis sistem akuntansi keuangan daerah pada badan kepegawaian daerah (bkd) kabupaten pesisir selatan*. *Pareso Jurnal*. <http://ejournal-unespadang.ac.id/index.php/PJ/article/view/128>.
- Angraini, D. &. (2019). *Sistem Informasi Akuntansi (Komputerisasi Kegiatan Pertanahan) Terhadap Pencatatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kantor Pertanahan Kabupaten*. <http://ejournal.stiesyariahengkalis.ac.id/index.php/jas/article/view/160>.
- BIDURI, S. (2018). *Akuntansi sektor publik*. UMSIDA Press.
- Cynthia, E.P. et al. 2022. Convolutional Neural Network and Deep Learning Approach for Image Detection and Identification. *Journal of Physics: Conference Series*, 2394 012019, pp. 1-6
- Cynthia, E. P., Rahadjeng, I. R., Karyadiputra, E., Rahman, F. Y., Windarto, A. P., Limbong, M., ... & Yarmani, Y. (2021, June). Application of K-Medoids Cluster Result with Particle Swarm Optimization (PSO) in Toddler Measles Immunization Cases. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1933, No. 1, p. 012036). IOP Publishing.
- Daerah., P. M. (2019). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah*. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 65(879), 2004–2006.
- Daerah., P. M. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*. . 1–445.
- Damayanti, I. (2020). *Sistem Pengendalian Internal Pada Sistem Akuntansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Krisna: Kumpulan Riset Akuntansi*. <https://ejournal.warmadewa.id/index.php/krisna/article/view/1852>.
- Dariana, D. &. (2017). *Analisis Sistem Informasi Akuntansi Pembayaran Biaya Tagihan Pemakaian Air Bersih Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Cabang Bengkulu. Akuntansi*. <http://ejournal.stiesyariahengkalis.ac.id/index.php/jas/article/view/113>.
- Destriana, N. (2015). *Pengaruh Debt to Equity Ratio, Dividen, dan Faktor Non Keuangan terhadap Agency Cost*. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*.
- Hantono, D. (2014). *Akuntansi Sektor Publik*. Media Sains Indonesia.
- Hussain, A. a. (2022). *Dividend policy and earnings management: Do agency problem and financing constraints matter?*, *Borsa Istanbul Review*. doi: <https://doi.org/10.1016/j.bir.2022.05.003>.
- Hidayat, M., Rangkuty, D. M., Ferine, K. F., & Saputra, J. (2024). The Influence of Natural Resources, Energy Consumption, and Renewable Energy on Economic Growth in ASEAN Region Countries. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 14(3), 332-338.
- Indrawan, M. I., Alamsyah, B., Fatmawati, I., Indira, S. S., Nita, S., Siregar, M., ... & Tarigan, A. S. P. (2019, March). UNPAB Lecturer Assessment and Performance Model based on Indonesia Science and Technology Index. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1175, No. 1, p. 012268). IOP Publishing.

- Indrasti, D. M. (2021). *Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Dalam Menunjang Efektifitas Pengendalian Internal*. Solusi, 19(2), 65–79. <https://doi.org/10.26623/slsi.v19i2.3163>.
- Liu, S. a. (2021). 'The agency problem revisited: a structural analysis of managerial productivity and CEO compensation in large US commercial banks', *Empirical Economics*, 60(1), pp. 391–418. doi: 10.1007/s00181-020-01982-5.
- Majid, J. (2019). *Akuntansi Sektor Publik*. CV. Berkah Utami ISBN.
- Makitulung, C. I. (2019). *Analisis Sistem Dan Prosedur Akuntansi Aset Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten*. JURNAL RISET AKUNTANSI. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/22322>.
- Masruri, F. A. (2020). *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang*. Sintesa Stie Sebelas April. <https://ejournal.stiel1april-sumedang.ac.id/ojs/index.php/ejournalstiesas/article/view/82>.
- Nasib, N., Azhmy, M. F., Nabella, S. D., Rusiadi, R., & Fadli, A. (2022). Survive Amidst the Competition of Private Universities by Maximizing Brand Image and Interest in Studying. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan*, 14(3), 3317-3328.
- Nasution, L. N., Suhendi, S., Rusiadi, R., Rangkyu, D. M., & Abdiyanto, A. (2022). Covid-19 Pandemic: Impact on Economic Stability In 8-Em Muslim Countries. *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(1), 336-352.
- NASUTION, L. N., RUSIADI, A. N., & PUTRI, D. 2022. IMPACT OF MONETARY POLICY ON POVERTY LEVELS IN FIVE ASEAN COUNTRIES.
- Nasution, L. N., Rangkyu, D. M., & Putra, S. M. (2024). The Digital Payment System: How Does It Impact Indonesia's Poverty?. *ABAC Journal*, 44(3), 228-242.
- Nasution, L. N., Sadalia, I., & Ruslan, D. (2022). Investigation of Financial Inclusion, Financial Technology, Economic Fundamentals, and Poverty Alleviation in ASEAN-5: Using SUR Model. *ABAC Journal*, 42(3), 132-147.
- Nasution, M. I. (2021). *Analisis penerapan sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan*. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*. <https://ojs.unimal.ac.id/jak/article/view/4577>.
- Natalia, B. (2020). *Analisa Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Untuk Meningkatkan Efektivitas Pengendalian Internal Pada Pt Gamma Utama Sejati*. *Business Management, Economic, and Accounting National Seminar*, 2(1), 766–780.
- Ningsih, Y. I. (2017). *Sistem Informasi Akuntansi dan Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat*. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*. <http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/412>.
- Novita, N. &. (2017). *Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Pegawai Negeri Sipil Pada UPTD SMPN 1 Purwoasri Kabupaten Kediri*. *Ojs.Unpkediri.Ac.Id*. <http://ojs.unpkediri.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/869>.

Purba, R., Umar, H., Siregar, O. K., & Aulia, F. (2023). Supervision of Village Financial Management: will it be in Parallel with the Development of Village Officials?(a Study of North Sumatra Province). *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(12), e1930-e1930.

Rohmah, N. F. (2019). *Struktur dan Desain Organisasi*. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3(1), 1–13.

Rangkuty, D. M., & Hidayat, M. (2021). Does Foreign Debt have an Impact on Indonesia's Foreign Exchange Reserves?. *Ekuilibrium: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 16(1), 85-93.

Rusiadi, N. S. (2023). Modeling the Impact of Tourism Brand Love and Brand Trust on Increasing Tourist Revisit Intention: An Empirical Study. *Journal of System and Management Sciences*, 13(4), 399-415.

RUSIADI, S., NOVALINA, A., NST, N., EFENDI, B., & NST, P. (2022). DYNAMIC RATIONAL EXPECTATIONS MODEL AND COVID-19 ON MONEY DEMAND IN CARISI COUNTRIES.

Rusiadi, Hidayat, M., Rangkuty, D. M., Ferine, K. F., & Saputra, J. (2024). The Influence of Natural Resources, Energy Consumption, and Renewable Energy on Economic Growth in ASEAN Region Countries. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 14(3), 332-338.

Ruslan, D., Tanjung, A. A., Lubis, I., Siregar, K. H., & Pratama, I. (2023). Monetary Policy in Indonesia: Dynamics of Inflation, Credibility Index and Output Stability Post Covid 19: New Keynesian Small Macroeconomics Approach. *Cuadernos de economía*, 46(130), 21-30.

SUHENDI, RUSIADI., NOVALINA, A., NST, N., EFENDI, B., & NST, P. (2022). POST-COVID-19 ECONOMIC STABILITY CHANGES IN NINE COUNTRIES OF ASIA PACIFIC ECONOMIC COOPERATION

Santosa, H. P. (2020). *Teknik Pemakai Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Individu Pada Karyawan Koperasi Republik Indonesia (Kpri) Di Kabupaten Manajemen Akuntansi*<http://ejournal.stieyapan.ac.id/index.php/MPAN/article/view/129>.

Setyowati Edyta Dwi, P. W. (2021). *Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Surabaya : Sebuah Tinjauan Teoritis*. *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 6(April), 17–28.

Sugiono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Method)*. Alfabeta.

Sulandari, D. (2017). *Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (Simda) Pada Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Studi Kasus pada SKPD Kabupaten Prodi Akuntansi UPY*. <http://repository.upy.ac.id/1293/>.

Syairozi, M. I. (2021). *Analisis Penerapan Good Governance dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah*. Dan Pengabdian 2021. <http://prosiding.rcipublisher.org/index.php/prosiding/article/view/111>.

- Trisnawati., L. (2018). *Analisis Penanganan Peti Kemas Muatan Berbahaya Pada PT.Samudera Indonesia di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta*. Jakarta.
- Yanto, E. &. (2020). *Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah(Simda Keuangan) Dalam Pengolahan Data Keuangan Pada OrganisasiPemerintah Daerah* Indonesian Journal of Strategic Management. <https://journal.uniku.ac.id/index.php/ijsm/article/view/2819>.
- Yuesti, A. (2020). *Akuntansi sektor publik (Issue 25)*. CV. Noah Aletheia.
- Widarman, A., Rahadjeng, I. R., Susilowati, I. H., Sahara, S., & Daulay, M. T. (2022, December). Analytical Hierarchy Process Algorithm for Define of Water Meter. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 2394, No. 1, p. 012030). IOP Publishing.